

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG PADANG

IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR DEVELOPING THE INTEGRATED TOURISM AREA OF GUNUNG PADANG

Nabeel Edgar Ferdrianda^{1*}, Rahmadani Yusran²

Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: nabeeledgar213@gmail.com^{1*}, yusranrdy@fis.unp.ac.id²

Abstract

The purpose of this study is to describe and evaluate the policy's implementation for the development of Gunung Padang's Integrated Tourism Area, as well as to pinpoint the elements that facilitate and impede its execution. The study was motivated by the issuance of Padang Mayor's Decree No. 100 of 2021, which established Gunung Padang as a leading tourist attraction. Van Meter and Van Horn's (1975) implementation model, which comprises six variables—policy standards and objectives, resources, attributes of implementing agencies, communication among organizations, economic-social-political conditions, and the disposition of implementers. Interviews, observation, and documentation were used to gather data. The findings demonstrate that the policy's implementation has been rather successful, bolstered by community involvement, legal certainty, and government commitment. There are still issues, though, like poor interagency collaboration, insufficient facilities, and a lack of human resources.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development, Gunung Padang, Padang City.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 yang menetapkan Gunung Padang sebagai destinasi wisata unggulan. Penelitian ini menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta disposisi pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan cukup baik, didukung oleh partisipasi masyarakat, kepastian hukum, dan komitmen pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, serta minimnya sumber daya manusia.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Gunung Padang, Kota Padang.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah adalah pariwisata. Menurut Wahid (2015), pariwisata adalah ketika seseorang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungan secara terus menerus, biasanya dalam waktu yang tidak lebih dari satu tahun, untuk alasan seperti kesenangan, bisnis, atau kebutuhan lainnya. Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang sangat melimpah, mempunyai potensi besar untuk mengembangkan pariwisata sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Menurut Hariadi (2023) Dalam konteks lokal, Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat mempunyai berbagai potensi destinasi wisata,

salah satunya adalah Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan alam yang tinggi.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Kota Padang. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan kawasan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas penunjang, kurangnya promosi wisata, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dengan realitas di lapangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan wisata juga masih terbatas, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh belum merata. Padahal, keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya analisis mendalam terhadap bagaimana kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan demikian, kajian ini menjadi relevan untuk dilakukan sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pengembangan wisata, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, serta mendorong pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat di Kota Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk memberi pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang di Kota Padang. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai pelaksanaan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi di lapangan.

Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dengan kebijakan, seperti pejabat dari Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup Kota Padang, pengelola kawasan, masyarakat sekitar, UMKM, dan wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan, laporan tahunan Dinas Pariwisata, data statistik kunjungan wisatawan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai metode utama. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012), wawancara adalah

pertemuan antara dua pihak untuk bertukar informasi dan ide dengan sesi tanya jawab yang bermakna terhadap topik tertentu. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk kelengkapan data penelitian melalui meninjau laporan, arsip, dan dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang berarti melakukan perbandingan dan konfirmasi terhadap data dari berbagai sumber dengan metode yang sama—untuk memastikan keabsahan data (Sugiyono, 2015). Menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984), yang dikutip oleh Sugiyono (2022), analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif proses implementasi kebijakan pengembangan Kawasan wisata terpadu gunung padang serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang

a. Meningkatkan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata berusaha meningkatkan kualitas hidup di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang dengan menata ruang, membangun infrastruktur pendukung, dan mempromosikan wisata secara konsisten. Upaya peningkatan ini juga diwujudkan melalui penyediaan fasilitas umum seperti area parkir, tempat istirahat, dan kebersihan lingkungan yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan. Selain itu, kegiatan promosi berbasis digital mulai digalakkan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kawasan telah meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tetapi perlu penguatan pada aspek keberlanjutan dan inovasi destinasi.

b. Pengelolaan Wisata Terpadu Gunung Padang untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Unggulan

Dalam aspek pengelolaan, Pemerintah daerah menggunakan prinsip kerja sama dalam pengelolaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sekitar, bisnis wisata, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pengelolaan ini berfokus pada pengembangan model wisata terpadu yang menggabungkan wisata alam, budaya, dan sejarah yang melekat pada Gunung Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal mulai meningkat, terutama dalam kegiatan ekonomi kreatif seperti penjualan souvenir, kuliner khas, dan jasa pemandu wisata. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada aspek manajerial, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan serta kurang optimalnya mekanisme koordinasi antarinstansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan sudah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat dalam aspek kapasitas dan tata kelola yang profesional agar dapat benar-benar mendukung pencapaian daya tarik wisata unggulan.

Permasalahan

a. Kurangnya Pengawasan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan

Permasalahan utama yang muncul dalam implementasi kebijakan peningkatan daya tarik wisata adalah keterbatasan anggaran daerah dan lambatnya proses realisasi program pembangunan fasilitas wisata. Beberapa sarana pendukung seperti akses jalan dan papan informasi masih belum memadai, sehingga memengaruhi kenyamanan pengunjung. Selain itu, promosi wisata yang dilakukan masih bersifat tidak terencana secara sistematis dan belum menggunakan strategi pemasaran terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala ini menyebabkan daya saing Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang belum sepenuhnya maksimal dibandingkan destinasi lain di Sumatera Barat.

b. Lemahnya Pengelolaan di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Unggulan

Permasalahan dalam pengelolaan kawasan lebih banyak disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan wisata. Ditemukan pula bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya pelestarian lingkungan wisata. Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata kecil juga menghambat peningkatan kualitas layanan di kawasan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan melalui pembentukan tim koordinasi lintas sektor dan pelatihan teknis bagi masyarakat, meski hasilnya belum sepenuhnya merata di seluruh area Gunung Padang.

Variabel yang Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang

a. Variabel Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang adalah adanya regulasi yang jelas dan menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Kota Padang memiliki sejumlah peraturan daerah (Perda) dan kebijakan turunan yang mendukung sektor pariwisata, termasuk pengelolaan kawasan wisata berbasis potensi lokal. Regulasi ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sehingga memberikan arah yang lebih terukur dalam pengembangan destinasi wisata. Selain itu, dukungan dari kebijakan provinsi dan pusat dalam bentuk program pariwisata berkelanjutan turut memperkuat posisi Gunung Padang sebagai kawasan strategis pariwisata daerah

b. Variabel Penghambat

Meskipun memiliki regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga kawasan wisata menyebabkan munculnya permasalahan lingkungan seperti kebersihan dan pengelolaan sampah. Faktor

cuaca ekstrem dan kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri yang memengaruhi aksesibilitas ke lokasi wisata. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi melalui strategi kolaboratif dan peningkatan partisipasi publik, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang merupakan upaya Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar kawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh sejumlah temuan yang menggambarkan tingkat keberhasilan kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan enam variabel utama dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang memiliki tujuan utama untuk menjadikan kawasan ini sebagai daya tarik wisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, penataan kawasan, serta peningkatan promosi wisata berbasis digital. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, diketahui bahwa sebagian besar target jangka pendek seperti penataan area parkir, kebersihan lingkungan, dan pengadaan fasilitas umum telah terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, kebijakan sudah diarahkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Masih terdapat beberapa area wisata yang belum tertata rapi, sarana pendukung seperti toilet umum dan tempat sampah masih terbatas, serta pemeliharaan lingkungan belum dilakukan secara rutin. Selain itu, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa pengelolaan kawasan belum konsisten dengan visi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kebersihan. Kesenjangan antara tujuan dan pelaksanaan di lapangan ini memperlihatkan perlunya evaluasi berkala dan pengawasan yang lebih intensif agar arah kebijakan dapat tercapai sesuai harapan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, baik dalam bentuk sumber daya manusia, dana, maupun fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah petugas lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Pariwisata masih terbatas sehingga

pengawasan, pemeliharaan, dan pelayanan terhadap wisatawan belum berjalan maksimal. Beberapa petugas mengaku harus menangani lebih dari satu area kerja sehingga efektivitas kerja berkurang. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti sarana kebersihan dan papan informasi juga menghambat kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia masih belum sebanding dengan kompleksitas kebutuhan kawasan wisata.

Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran untuk pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang juga tergolong minim. Beberapa program seperti pelatihan SDM, peningkatan promosi, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena keterbatasan dana daerah. Namun demikian, dukungan masyarakat lokal cukup tinggi. Banyak warga yang berinisiatif membuka usaha kecil seperti warung makan, jasa parkir, serta penyewaan alat rekreasi bagi wisatawan. Partisipasi ini menjadi bentuk sumber daya sosial yang berkontribusi terhadap kelangsungan pengelolaan kawasan. Meskipun belum bersifat formal, keterlibatan masyarakat menjadi potensi penting yang dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan apabila difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

Karakteristik Lembaga Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan wisata ini melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai koordinator utama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing lembaga telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam struktur birokrasi. Dinas Pariwisata berperan dalam perencanaan dan promosi, DLH menangani aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan. Secara administratif, koordinasi antarinstansi telah diatur melalui surat keputusan dan rapat koordinasi lintas sektor.

Namun, hasil dilapangan menunjukkan bahwa koordinasi di tingkat pelaksana belum berjalan secara efektif. Kegiatan seperti penanganan kebersihan dan pembangunan fasilitas umum masih tumpang tindih. Beberapa program kerja yang dijalankan antarinstansi belum terintegrasi, sehingga menyebabkan keterlambatan dan duplikasi kegiatan. Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat utama merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses perencanaan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi pelaksana telah terbentuk, pola koordinasi dan kolaborasi antaraktor masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih terarah dan efisien.

Komunikasi Antar organisasi

Komunikasi antaraktor kebijakan merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitar, komunikasi antara lembaga pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat masih cenderung bersifat satu arah. Pemerintah sering kali hanya menyampaikan informasi kebijakan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, sebagian masyarakat kurang memahami maksud, arah, dan manfaat dari kebijakan pengembangan kawasan wisata tersebut. Sosialisasi yang dilakukan juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM

di sekitar Gunung Padang.

Selain itu, komunikasi lintas lembaga pelaksana juga belum berjalan maksimal. Promosi wisata melalui media sosial, misalnya, dilakukan secara terpisah antara pemerintah dan komunitas lokal tanpa adanya koordinasi terpadu. Hal ini menyebabkan kegiatan promosi belum efektif dalam menarik wisatawan secara luas. Kurangnya komunikasi dua arah antara pelaksana dan masyarakat menyebabkan partisipasi publik yang rendah dan gagasan bahwa kebijakan ini hanya dibuat dari tingkat atas. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan wisata di Gunung Padang.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial dan politik di Kota Padang yang relatif stabil menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat sekitar menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan ini karena memberikan peluang ekonomi baru. Banyak warga yang memanfaatkan momentum pengembangan kawasan dengan membuka usaha seperti warung makan, tempat sewa alat wisata, serta jasa parkir. Aktivitas ekonomi ini telah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran lokal. Dengan demikian, secara sosial-ekonomi, kebijakan ini telah secara positif memberi dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata.

Namun, di sisi lain, peningkatan aktivitas wisata juga menimbulkan konsekuensi lingkungan yang cukup serius. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan volume sampah dan penurunan kualitas kebersihan di beberapa titik kawasan wisata. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu menyebabkan sebagian besar limbah menumpuk dan mencemari lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi belum diimbangi dengan perhatian yang cukup terhadap aspek lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan wisata di Gunung Padang perlu diarahkan pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem.

Disposisi Pelaksana (Sikap dan Komitmen)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai Dinas Pariwisata dan petugas lapangan menunjukkan sikap yang positif dan memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang. Mereka menyadari pentingnya peran Gunung Padang sebagai ikon wisata Kota Padang dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Petugas juga dikenal ramah, komunikatif, dan berusaha menjaga kenyamanan pengunjung meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Sikap profesional ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun citra positif kawasan wisata.

Namun, keterbatasan pelatihan dan fasilitas kerja menjadi kendala yang memengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Beberapa petugas mengaku belum mendapatkan bimbingan

teknis yang memadai terkait manajemen pariwisata, penanganan pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya berjalan efisien. Meskipun demikian, dedikasi dan tanggung jawab pelaksana tetap menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan. Dengan peningkatan kapasitas SDM dan dukungan manajerial yang lebih kuat, sikap positif para pelaksana dapat menjadi fondasi keberhasilan jangka panjang bagi pengembangan wisata Gunung Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang di Kota Padang menunjukkan bahwa, meskipun belum optimal, pelaksanaannya secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Kebijakan ini telah memiliki arah dan tujuan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021, dengan sasaran menjadikan Gunung Padang sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sebagai pelaksana utama, Dinas Pariwisata telah berusaha melaksanakan tugas koordinasi, penataan, dan promosi wilayah. Namun, mereka menghadapi masalah seperti kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi lintas instansi. Meskipun demikian, komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan tergolong baik, disertai dukungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pengembangan kawasan wisata.

Secara umum, implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dan penguatan citra wisata Kota Padang. Namun, kebijakan masih memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan fasilitas publik yang ramah pengunjung. Pemerintah juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan serta kelestarian lingkungan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata Kota Padang. (2023). *Laporan Tahunan Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2023*. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hariadi, B., & Meilina, S. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang. *JAPAN: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 123-130.
- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Kota Padang. Pemerintah Kota Padang.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

- Nugroho, Riant. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

